

Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault atas Propaganda Media dalam Membangun Diskursus Politik

Martinus S. Barasa* & F.X. Armada Riyanto

Program Studi Filsafat Keilahian, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi,
Widya Sasana Malang, Indonesia

Diterima: 22 Mei 2023; Direview: 04 Juni 2023; Disetujui: 08 Agustus 2023

*Corresponding Email: Martinusbarasa03@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perspektif Foucault tentang kekuasaan dalam media sebagai alat politik. Masalah difokuskan pada pemikiran Foucault tentang keterkaitan antara kekuasaan dan pengetahuan. Kekuasaan sering dipandang menjadi tujuan atau cara berpolitik. Dengan kekuasaan itu, pihak penguasa mampu mengontrol sistem pengetahuan. Media seringkali menjadi alat yang digunakan oleh penguasa politik untuk membuat pendapat umum. Jika pendapat itu telah diterima oleh banyak orang, maka bisa dikatakan media itu berhasil dan penguasa mampu mengontrol banyak orang. Guna mendekati permasalahan tersebut dipergunakan acuan pemikiran Foucault tentang teori kekuasaan. Data pemikiran Foucault diperoleh dari literature-literatur yang diperoleh melalui buku maupun jurnal. Teori Foucault tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis peranan media dalam kehidupan masyarakat terutama dalam bidang politik. Kajian ini menyimpulkan bahwa media juga turut menentukan arah berpolitik masyarakat tertentu. Arah politik ini ternyata ditentukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan atas media itu. Media juga memiliki kekuatan untuk menciptakan budaya secara massal dengan cara-cara yang dianggap wajar. Politik sebagai diskursus digunakan untuk menguasai dalam bentuk bahasa yang disebarkan oleh media-media. Pada akhirnya pengetahuan tidak lagi bersifat netral namun telah dikuasai oleh pihak penguasa.

Kata Kunci; Media; Politik; Foucault; Diskursus

Abstract

This paper aims to examine Foucault's perspective on power in the media as a political tool. The problem focuses on Foucault's thoughts on the relationship between power and knowledge. Power is often seen as a goal or a way of doing politics. With that power, the ruling party is able to control the knowledge system. The media is often a tool used by political rulers to create public opinion. If that opinion has been accepted by many people, then it can be said that the media succeed and the ruler is able to control many people. In order to approach the problem, Foucault's thoughts on the theory of power are used. Data on Foucault's thoughts are obtained from literature obtained through books and journals. Foucault's theory is then used to analyze the role of the media in people's lives, especially in the political field. This study concludes that the media also determines the political direction of certain communities. This political direction is determined by those who have power over the media. The media also has the power to create mass culture in ways that are considered reasonable. Politics as a discourse is used to control in the form of language spread by the media. In the end, knowledge is no longer neutral but has been controlled by the ruling parties.

Keywords; Media; Politics; Foucault; Discourse

How to Cite: Martinus S. Barasa & F.X. Armada Riyanto, (2023), Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault atas Propaganda Media dalam Membangun Diskursus Politik. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6(1): 188-195



PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, media memiliki peranan penting bagi seluruh kalangan masyarakat. Saat ini media memiliki beragam bentuk yang memungkinkan kemudahan untuk diakses oleh setiap orang baik itu media online maupun media cetak. Sebagai sumber informasi, media massa memainkan peranan penting dalam banyak aspek kehidupan masyarakat, mulai dari bidang ekonomi, sosial, kesehatan hingga politik. Melalui berita-berita yang disebar oleh media, secara tidak langsung juga mempengaruhi keputusan masyarakat. Mengingat besarnya peran media tersebut maka dapat dikatakan bahwa media merupakan pertemuan antara banyak kekuatan dan kepentingan di dalamnya (Koike, 2002).

Peranan media dalam kehidupan masyarakat berada dalam posisi yang strategis dalam menentukan dan menggiring opini publik sehingga mampu menentukan sikap masyarakat terhadap sebuah peristiwa. Tidak jarang pula pemberitaan yang dilakukan media membuat banyak pihak tidak menyadari peristiwa atau situasi yang sebenarnya. Dalam ranah politik, media memiliki peranan dalam membentuk dan membangun pemahaman dan perilaku politik masyarakat. Pengaruh media tersebut dapat dilihat sebagai perwujudan dari salah satu elemen demokrasi yang dianut oleh Indonesia (Ritonga, 2017).

Media menyampaikan informasi dan pesannya melalui gambar dan bahasa yang memiliki makna bagi mereka yang membaca atau melihatnya. Dalam pandangan Foucault pengetahuan dan informasi yang disampaikan oleh media tersebut dapat dikatakan tidak natural atau murni, di dalamnya termuat kekuasaan (Syahputra, 2010). Dalam pandangan Foucault kekuasaan bukanlah sebuah hak milik, melainkan sebagai strategi. Informasi dan pengetahuan yang disampaikan oleh media diatur sedemikian rupa sesuai dengan politik media penyaji berita tersebut. Hal ini memungkinkan sebuah peristiwa yang sama memiliki perbedaan saat disampaikan oleh media tertentu.

Foucault berpendapat bahwa antara kekuasaan dan pengetahuan memiliki keterkaitan, keduanya sering dipakai sebagai control sosial melalui lembaga-lembaga tertentu (Pratama, 2021). Berita yang disampaikan dalam media dapat disebut tidak bebas nilai karena dalam skala tertentu merupakan alat kontrol sosial pihak tertentu (Oetama, 2001). Oleh sebab itu media dapat juga disebut sebagai perpanjangan dari masyarakat atau golongan tertentu dalam menyampaikan sesuatu. Demikian juga halnya politik yang berlandaskan demokrasi, tidak pernah bisa lepas dari ketergantungannya atas media.

Dalam pandangan Foucault, tiap-tiap zaman memiliki karakter yang berbeda-beda dengan zaman lainnya, hal itu tergantung pada siapa yang berkuasa pada zaman tersebut. Bagi manusia modern media bukan hanya sebagai sebuah penyampai informasi tetapi juga menentukan latar belakang pembentukan wacana publik yang berlaku. Media sebagai bentuk relasi juga mengandung kuasa di dalamnya. Politik sebagai sebuah diskursus dapat disampaikan dalam bentuk bahasa-bahasa media yang tersebar di kalangan masyarakat. Bahasa menjadi sebuah agen politik dalam media untuk menggiring bahkan mempengaruhi banyak orang. Bahasa adalah alat rasional yang dipakai politik (Riyanto, 2014).

Mengenai pengaruh media dalam bidang politik telah dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu. Pendangan akan pentingnya peranan media dalam politik membuat siapapun yang hendak memasuki dunia politik perlu memiliki keterampilan dalam menggunakan media, terutama media sosial seperti disampaikan oleh Atika Aisyarahmi Munzir (Munzir et al., 2019). Hal senada juga di dampingkan oleh Idil Akbar mengenai media sebagai pilar demokrasi dan sarana memperoleh informasi tentang banyak hal dan tidak jarang pula media membawa kepentingan maupun ideologi tertentu (Akbar, 2016). Pandangan kuasa dalam media bagi masyarakat luas juga telah dibahas oleh Iswandi, penelitian tersebut menegaskan perlunya evaluasi moral dalam bidang industri media (Syahputra, 2010).

Pemikiran Foucault tentang kekuasaan sebagai salah satu kajian politik juga dibahas dalam penelitian. Pendapat yang dikemukakan adalah kekuasaan dalam bidang politik harus dimiliki dan diwariskan. Dalam konteks Indonesia teori kekuasaan Foucault pernah dikaji oleh Konrad Kebung dia menjelaskan bahwa pengetahuan dan kekuasaan dipraktekkan dalam sistem pemikiran sejarah manusia (Kebung, 2017a).

Tulisan ini mengangkat topik teori kekuasaan Foucault atas propaganda media dalam membangun diskursus politik hendak menunjukkan bahwa media berperan membentuk sikap

politik banyak orang. diskursus politik dalam media dapat dilihat melalui bahasa-bahasa media dalam pemebritannya. Media juga memiliki pengaruh dalam menentukan pengetahuan khalayak ramai tentang pengetahuan politik. Pemberitaan yang dilakukan media dianalisis menggunakan teori kekuasaan Foucault. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya kritis dalam menanggapi berita-berita politik yang disampaikan media. Sebab tidak jarang media menggunakan hal-hal yang dianggap wajar untuk membentuk sebuah pandangan bahkan kebudayaan massal dengan cara-cara yang dianggap oleh banyak orang wajar. Media dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengatur dan menentukan arah politik banyak orang, sehingga politik yang demokratis tidak dapat terlaksana karena telah disetir oleh pihak penguasa.

METODE PENELITIAN

Dalam tuisan ini metode yang digunakan adalah metode kajian pustaka. Studi kepustakaan adalah studi yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi maupun data melalui material tulisan yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah dan lain sebagainya (Mardalis, 1999). Metode merupakan hal penting dalam penulisan karena memuat cara untuk mencapai suatu acuan dalam penelitian. Dengan pendekatan kepustakaan penulis melakukan pengkajian dari berbagai sumber informasi berupa jurnal yang berisi pemikiran Foucault. Metode ini dipilih karena dianggap paling mungkin untuk dilakukan untuk memperoleh pendekatan terhadap pemikiran Foucault. Data yang berkaitan dengan tema yang hendak dibahas kemudian dijabarkan dengan menggunakan metode deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kekuasaan Michel Foucault

Foucault adalah seorang pemikir yang lahir di Prancis, tepatnya Poitiers pada tanggal 15 Oktober 1926. Dia menempuh pendidikan di *Ecole Normale Superieure* di Paris di bidang filsafat dan psikologi. Foucault pernah mengemban tugas di bidang akademis menjadi seorang Direktur Departemen Filsafat di University of Clermont-Ferrand dan University of Vincennes. Dia juga pernah menjabat di *Collegede France* dan pernah mengajar di Universitas California Berkeley dan pada tahun 1984 Foucault meninggal dunia di Paris (Lecht, 1999). Foucault lahir di dalam keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Ia mengenyam pendidikan yang baik di sekolah-sekolah rendah dan kemudian belajar dan mengajar di sekolah-sekolah maupaun universitas kenamaan (Kebung, 2017b). Sejak usia dini Foucault sudah terbiasa dengan berpikir kritis apalagi masa itu di Prancis diwarnai dengan keterbukaan dan kebebasan berpikir. Hal ini tentunya tidak lepas dari peranan pemerintah yakni atas nama departemen pendidikan (Kebung, 2015).

Foucault merupakan seorang yang ahli dalam sejarah sistem berpikir manusia dan tertarik untuk mempelajari peristiwa sejarah serta membuat analisis mengenai peristiwa sejarah tersebut dari tatanan berpikir. Sepanjang perjalanan pemikirannya Foucault banyak dipengaruhi oleh Nietzsche. Karya Foucault dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yakni pengetahuan (kekuasaan), kuasa dan subjek atau etika (Kebung, 2017b). Foucault menaruh minat pada bagaimana kekuasaan itu dipraktekkan pada pengetahuan dan dalam kebenaran serta bagaimana keduanya dibentuk melalui praktek yang ada dalam kehidupan masyarakat. Minat Foucault pada kebenaran itu tidak bersidat abstrak filosofis, tetapi dalam analisa apa yang disebutnya sebagai permainan kebenaran (Kenneth, 2006).

Permainan yang dimaksudkan Foucault di sini tidak merujuk pada kebenaran dalam sejarah adalah sebuah kesalahan, tetapi Foucault mencoba membedah bagaimana kebenaran itu diasumsikan. Ketertarikannya pada permainan kebenaran untuk melihat bahwa dalam hidup manusia terdapat aturan-aturan, sumber dan praktek dalam menciptakan apa yang dikatakan benar bagi manusia (Bdk. Agustin, 2009). Metode yang dipakai Foucault adalah metode *counter-history*, yakni membedah sejarah. Foucault memang tidak menulis sejarah namun ia melihat kemungkinan lain dengan membedah sejarah yang sudah ada. Hal ini dikarenakan sejarah sering kali dilihat sebagai sesuatu yang benar terjadi di masa lampau. Foucault melihat sejarah sebagai sesuatu yang tidak dapat diasumsikan sebagai kebenaran mutlak tetapi memiliki kemungkinan lain di dalamnya. Bagi Foucault sejarah bukanlah berupa kontinuitas yang berkelanjutan dan

apabila sejarah dilihat sebagai kontinuitas yang berkelanjutan, maka salah satu konsekuensinya adalah diskontinuitas yang terdapat dalam sejarah menjadi sesuatu bahan mentah yang harus ditata kembali agar sejarah dapat diketahui (Agustin, 2009).

Pada bagian *Counter-History*, Foucault berusaha menyajikan arkeologi dan genealogi. Kedua hal ini dapat di temukan dalam tulisan Foucault berikut: "kebenaran" harus dipahami sebagai suatu sistem prosedur-prosedur yang teratur bagi produksi, pengaturan, distribusi, sirkulasi dan operasi pernyataan-pernyataan. "Kebenaran" dihubungkan dalam relasi sirkular dengan sistem-sistem kuasa yang menghasilkan dan mempertahankannya dan dihubungkan pada efek-efek kuasa yang dipengaruhinya dan yang meluaskannya. Suatu 'rezim' kebenaran"(Hardiyanta, 1997).

Pandangan mengenai arkeologis diuraikan oleh Foucault dalam pandangan yang pertama dan metodenya terkandung dalam pandangan yang kedua. Keduanya sering disamakan, namun arkeologi berorientasi pada penjabaran hubungan antara intitusional, praktek dan pengetahuan. Sementara genealogi lebih menunjukkan karya Foucault yang sebenarnya hendak menunjukkan asal-usul apa yang dianggap rasional, pembawa kebenaran, penaklukan, hubungan kekuatan-kekuatan atau lebih spesifiknya disebut sebagai kuasa (Kenneth, 2006).

Kuasa bukanlah sesuatu yang sama dengan hak milik yang dapat diperoleh, disimpan ataupun dibagi, ditambah maupun dikurangi. Bagi Foucault, kekuasaan tidak dimiliki tetapi dipraktekkan dalam ruang lingkup yang terdapat berbagai macam posisi yang secara strategis berkaitan dengan yang lain serta mengalami pergeseran. Kuasa sering dikaitkan dengan lembaga, terutama aparat Negara, namun dalam pandangan Foucault, strategi kuasa berlangsung di mana-mana (Bdk. Berthens, 1996). Foucault melihat bahwa kekuasaan tidak dimiliki oleh seseorang, namun kuasa merupakan bagian dari setiap relasi antara manusia.

Kekuasaan menurut Foucault tidak bersifat negative, namun tersebar di mana-mana. Foucault melihat kekuasaan sebagai strategi, jaringan mekanis yang membuat sebuah keputusan di teriman dan dijalankan begitu saja, tanpa adanya berbagai macam pertimbangan dan penolakan (Kritzman, 1988). Dalam kehidupan manusia di manapun itu, selalu terdapat aturan, sistem-sistem dan regulasi dan di mana ada relasi antar manusia di sanapun ada kekuasaan yang selalu bekerja. Setiap kehidupan manusia, selalu mengenal beberapa strategi kuasa yang bersangkutan dengan kebenaran, ada yang diterima sebagai benar, ada juga yang diterima sebagai yang salah. Singkatnya ada instansui yang menjamin perbedaan antara kebenaran dan tidak benar (Berthens, 1996).

Foucault melihat bahwa pengetahuan berada dalam kebenaran pernyataan ilmiah dan hal itu dapat dilihat dalam masyarakat. Setiap orang dituntut untuk mentaati kebenaran ilmiah tersebut karena di dalamnya ada kuasa yang mengatur mereka. Pengetahuan dengan kata lain dapat disebut telah dibentuk oleh kekuasaan dan darinya juga dihasilkan pengetahuan. Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak bekerja secara negatif, melainkan positif dan produktif, dia bukan kekuatan tetapi sebuah strategi kompleks dalam masyarakat (Kamahi, 2017).

Untuk memahami kekuasaan dalam perspektif Foucault harus berangkat dari sebuah pertanyaan bagaimana kekuasaan itu dijalankan, bukan soal siapa dan apa itu kekuasaan (Cronin, 1996). Kekuasaan adalah sesuatu yang relasional dan mengandaikan sebuah relasi dalam manusia. Kekuasaan tidak bertujuan untuk menguasai atau menundukkan yang satu atau yang lain, melainkan menyebar dan terkadang tidak disadari oleh objek kekuasaan tersebut. Oleh sebab itu kekuasaan dapat dipandang sebagai sesuatu yang terus bergerak seturut relasi dalam manusia. Di dalamnya lahir objek pengetahuan yang baru dan pengetahuan itu juga memberikan pengaruh yang baru pada kekuasaan. Tanpa pengetahuan, kekuasaan tidak mungkin dapat dijalankan (Sarup, 2011).

Media Dan Politik

Sejak berakhirnya masa orde baru, keterlibatan media dalam dunia politik menjadi sangat kuat. Runtuhnya pemerintahan presiden Soeharto membuat media memperoleh kebebasan dan kontrol yang pada saat itu sangat dibatasi oleh pemerintahan orde baru. Kemunculan berbagai media disebabkan oleh asas kebebasan terkhusus dalam kebebasan politik yang berhubungan dengan kebebasan pers (Neumann, 1998). Media tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai tempat kebebasan berekspresi dan sumber informasi. Kebebasan media juga



banyak dipengaruhi oleh sistem negara demokrasi yang menekankan kebebasan berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia. Melalui media setiap orang dari berbagai kalangan dapat menyampaikan aspirasinya ke khalayak ramai.

Media saat ini diyakini sebagai bagian vital dari sistem politik demokrasi, darinya diperoleh informasi mengenai isu-isu penting termasuk isu politik yang sedang terjadi. Sejak runtuhnya orde baru, transformasi politik menjadi bagian penting dari kontribusi media. Di dalam media membuka kemungkinan bagi dunia politik untuk melakukan dan menyampaikan pesan-pesan politik kelompok tertentu (Ritonga, 2017). Hakekat kehadiran media dalam kehidupan masyarakat diharapkan untuk memberikan gambaran dari sudut pandang yang adil atas segala persoalan dan fenomena-fenomena yang terjadi (Miftajanna, 2022)(Suharyanto, 2016).

Dalam sistem demokrasi antara media dengan politik sebenarnya memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan dunia yang semakin modern membuat banyak kalangan masyarakat lebih tergantung kepada media. Ketika terjadi konflik politik, media menjadi sasaran yang banyak diburu oleh masyarakat untuk memperoleh informasi dan di sisi yang lain, politik dapat menggunakan bahasa-bahasa media untuk menghindari terjadinya krisis politik (Fermana & Zetra, 2022).

Dalam sistem demokrasi, partisipasi setiap anggota masyarakat juga sangat diharapkan dalam menentukan arah politik. Berkaitan dengan tujuan itu, media dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam politik. Hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik warga negara (Zubaidi et al., 2020). Selain itu media juga dapat berperan sebagai pengawas terhadap kinerja dan jalannya dunia politik di daerah tertentu. Keterbukaan dan kejujuran media menjadi faktor yang penting dalam melaksanakan tugas ini. secara positif, media turut membantu dalam bidang pengembangan nilai demokrasi di dalam berbagai negara (Hidayati, 2021).

Dalam hubungannya dengan politik, media menjadi sebuah perpanjangan tangan yang menyampaikan aspirasi masyarakat lokal kepada pimpinan daerah maupun pusat (Hidayati, 2021). Dalam sepanjang sejarah media di berbagai penjuru dunia, media memiliki dualism yang tidak mudah untuk diselesaikan. Di satu sisi kehadiran media memberikan banyak manfaat dan peluang untuk perkembangan masyarakat, namun disisi lain, media juga dapat dipakai sebagai sebuah alat untuk mengkung dan membatasi masyarakat terhadap realitas yang sebenarnya. Media pada dasarnya diharapkan sebagai *watch dog* terhadap keadaan di ruang publik (Sitompul, 2014). Media dalam garis besar pemberitaannya harus selalu bersandar pada pilar utama kebenaran (Kovach & Rosentiel, 2006).

Dalam sejarah manusia media dianggap sebagai sebuah perpanjangan tangan elemen masyarakat dan turut menentukan periode sejarah manusia (Littlejohn, 2002). Dalam hal ini media memiliki sebuah kemampuan yang dapat digunakan sebagai alat ideologi yang mampu mengarahkan dan menarik perhatian serta sikap banyak orang. Dengan kata lain, keberadaan media dalam kehidupan masyarakat menjadi sebuah penggerak di dalam dunia politik. Dalam sudut pandang lainnya yakni konstruktivisme, media dipandang sebagai subyek yang dapat mengkonstruksi realitas dan memiliki keberpihakan (D. N. Hidayat, 1997). Hal yang disampaikan oleh media bukanlah sesuatu yang natural melainkan sudah dikonstruksi sehingga media menjadi penerjemah bagi pikiran manusia atas peristiwa yang sudah terjadi.

Pada akhirnya media sebagai perpanjangan dan penerjemah atas sebuah fenomena membutuhkan bahasa sebagai alat dasarnya. Hal itu turut menentukan hasil seperti apa yang ingin dicapai oleh media itu. Bahasa membuat pemberitaan media menjadi sebuah diskursus publik yang nantinya turut mempengaruhi cara pandang dan bersikap banyak orang. Idealnya saat berhadapan dengan situasi konkret politik demokrasi, media dalam pemberitaannya memiliki lima peran (McNair, 2011). Pertama memberikan informasi tentang apa yang terjadi, kedua memberikan edukasi, ketiga sebagai wadah diskursus, keempat berperan untuk mengkritik pemerintahan dan kelima, media berperan untuk mengadvokasi pandangan politik (Hajad, 2016).

Keberadaan media menjadi sebuah sarana penting bagi politik dalam menyampaikan dan juga menjadi sarana referensi masyarakat dalam menentukan arah berpolitiknya. Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, media sebagai sebuah saluran yang dapat menggaungkan pendapat banyak orang. Dalam dunia politik, media bukan hanya menjadi

sebuah penyampai informasi, tetapi dapat juga sebagai sebuah alat yang dapat mengandung ideologi dari berbagai aliran politik. Hal tersebut tergantung dari tujuan dan kepentingan media dalam pemberitaannya. Situasi politik yang berada dalam masa mediasi, membuat media memiliki peranan yang besar dan membuatnya sulit dipisahkan dari dunia politik (Hamid, 2004).

Diskursus Politik dalam Media

Dalam pandangan banyak kalangan, media dilihat sebagai sebuah institusi yang juga berperan sebagai aktor politik. Media mampu berperan dalam dunia politik terkait mendukung atau beroposisi dan hal itu sangat penting dalam pergerakan demokrasi (Hajad, 2016). Media mampu mengkonstruksi fenomena-fenomena yang terjadi dengan membawa juga politik media yang mereka miliki. Ada tiga unsur penting dalam membentuk politik media yakni, politisi, jurnalis dan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu. Ketiganya seringkali berada dalam posisi yang saling bertolak belakang. Di pihak lain, politisi ingin agar jurnalis menyajikan berita yang netral namun di sisi lain, jurnalis tidak ingin menjadi perpanjangan tangan pihak lain atau tidak ingin dikontrol oleh kepentingan manapun termasuk pemerintah atau politisi (Hajad, 2016).

Situasi tegang antara media dan politisi termasuk pemerintah tertentu membuat tingkat kerumitan isi dalam media menjadi lebih tinggi. Media menjadi sebuah pertemuan antara banyak pihak masyarakat modern yang berkonflik (Dalimunte & Lubis, 2019). Tingkat intensitas konflik tersebut dapat dilihat dari bahasa pemberitaan media yang telah dikonstruksi atau dibentuk oleh kepentingan dan keberpihakan media. Bahasa politik media dapat dilihat sebagai sebuah diskursus yang bertujuan untuk mendominasi ataupun bentuk kekuasaan pihak tertentu (Hajad, 2016).

Media sebagai sumber pengaruh politik seringkali digunakan untuk mendulang suara dan memperoleh pengaruh politik (Ritonga, 2017). Dalam situasi ini alat yang digunakan media adalah bahasa. Bahasa dalam pemberitaan yang dikonstruksi media juga dapat dipahami sebagai sebuah diskursus politik. Politik juga merupakan sebuah diskursus yang di dalamnya memungkinkan terjadinya sebuah diskusi dan bukan tawar menawar, hal itu selalu mengandaikan akal budi (Riyanto, 2014). Dengan demikian dapat ditemukan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh Foucault dalam teori pengetahuannya.

Seperti sudah dikemukakan sebelumnya mengenai kekuasaan dalam pemikiran Foucault tidak terletak pada apa itu kekuasaan tetapi bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Kekuasaan tidak hanya dapat dilihat dalam kekuasaan politik atau pemerintah, tetapi menyebar dal seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berinteraksi satu dengan yang lain (Syahputra, 2010). Foucault melihat kekuasaan itu bekerja melalui bahasa-bahasa yang digunakan dalam interaksi manusia. Media dan politik sama-sama menggunakan bahasa sebagai aspek diskursifnya dan hal tersebut menjadi sebuah cara yang ampuh untuk menjangkau khalayak ramai.

Berdasarkan teori kekuasaan Foucault, media dalam pemberitaannya juga menunjukkan kekuasaannya bagi masyarakat. Dalam hal ini kekuasaan yang dimaksud adalah kendali terhadap media tersebut yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan membentuk wacana politik masyarakat. Hal itu disebabkan karena pihak manapun yang berkuasa memiliki kemampuan untuk menciptakan wacana yang bertujuan mendominasi. Hal tersebut dilakukan melalui media sehingga dapat dianggap wajar oleh banyak orang (Syahputra, 2010).

Kekuasaan tidak pernah datang dari luar, tetapi dari dalam. Media yang menjadi bagian integral masyarakat modern dalam relasi dengan sesamanya menjadi sebuah alat yang mampu menguasai dari dalam (Dalimunte & Lubis, 2019). Dalam konteks demokrasi Indonesia, sangat mungkin menggunakan media sebagai konstruksi pengetahuan masyarakat. Teori kekuasaan Foucault dapat dipakai untuk menimbang dan mendalami kekuasaan politik di Indonesia. Hal tersebut disebabkan media yang independen sangat rumit untuk diperoleh. Oleh sebab itu sangat penting memahami media dan kekuasaan-kekuasaan yang terkandung di dalamnya (Syahputra, 2010).

SIMPULAN

Foucault dalam teori kekuasaannya berpendapat bahwa kekuasaan bukanlah sebuah hak milik seseorang, melainkan sebuah strategi dan menyebar dalam berbagai relasi manusia. Kekuasaan yang demikian tidak pernah datang dari luar, melainkan dari dalam yakni interaksi manusia. Media sebagai bagian integral relasi manusia juga tidak jarang mengandung unsur kekuasaan dari pihak-pihak tertentu. Media dengan bahasa pemberitaannya memberikan dan mengkonstruksi pengetahuan yang disebarkan kepada masyarakat. Sebagai pilar politik, media merupakan sebuah diskursus yang dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik untuk membentuk kebenaran-kebenaran umum dan menyiarkannya kepada khalayak ramai. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat hubungan yang erat antara kekuasaan dan pengetahuan. Pengetahuan sering dikuasai dalam bentuk politik-politik media, sehingga menggiring perilaku dan sikap politik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S. M. (2009). Foucault dan Komunikasi (Telaah Konstruksi Wacana dan Kuasa Foucault dalam Lingkup Ilmu Komunikasi). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(3), 199–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jik.v7i3.27>
- Akbar, I. (2016). Islam, Media, dan Politik: Sebuah Perdebatan dan Kontempelasi Nilai Berdemokrasi. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 98–111.
- Berthens, K. (1996). *Seri Filsafat Atmajaya: Filsafat Barat A bad XX jiid II: PRANCIS*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cronin, C. (1996). Bourdieu and Foucault on Power and Modernity. In *Philosophy Social Criticism* (pp. 55–85).
- Dalimunte, M. A., & Lubis, F. A. (2019). Internet sebagai Media Interaktif Disalahgunakan oleh Elit Politik. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Pengembangan Ilmu KOMunikasi Dan Sosial*, 3(2), 122–136. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/komunikologi.v3i2.6378>
- Fermana, R. A., & Zetra, A. (2022). Relasi Media Massa dan Politik pada Pemilihan Umum Presiden 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 7(1), 71–83. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.32370>
- Hajad, V. (2016). MEDIA DAN POLITIK (Mencari Independensi Media Dalam Pemberitaan Politik). *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/source.v2i2.295>
- Hamid, I. (2004). *Konstruksi Relaitas Politik Dalam Media Massa*. Granit.
- Hardiyanta, P. S. (1997). *Michel Foucault, Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern* (1st ed.). LkiS Yogyakarta.
- Hidayat, D. N. (1997). *Pardigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi. Jurnal ISKI, Menuju Paradigma Baru Penelitian Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Hidayati, F. R. (2021). Komunikasi Politik dan Branding Pemimpin Politik Melalui Media Sosial: A Conceptual Paper. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5(2), 145–161.
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitabah*, 3(1), 117–133.
- Kebung, K. (2015). *Filsafat Itu Indah* (2nd ed.). Prestasi Pustaka.
- Kebung, K. (2017a). Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault dalam Konteks ‘Kekuasaan’ di Indonesia. *MELINTAS*, 33(1), 34–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>
- Kebung, K. (2017b). Membaca “Kuasa” Michel Foucault Dalam Konteks “Kekuasaan” Di Indonesia. *MELINTAS*, 33(1), 34–51.
- Kenneth, A. (2006). *Contemporary Social and Sociological Theory*. Pine Forge Press, Sage Pub, Inc.
- Koike, M. (2002). *Globalizing Media and Local Society in Indonesia*.
- Kovach, B., & Rosentiel, T. (2006). *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Yayasan Pantau.
- Kritzman, L. D. (Ed.). (1988). *Michel Foucault, Politics, Philosophy, Culture, Interviews and Other Writings 1977 – 1984*. Routledge.
- Lecht, J. (1999). *Fifty Key Contemporary Thinkers: From Strukturalism to Postmedernism*. Routledge.
- Littlejohn, W. S. (2002). *Theories of Human Communication*. Wadsworth Publishing Company.
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.
- McNair, B. (2011). *An Introduction To Political Communication*. Routledge.
- Miftajanna, S. (2022). Peran Media Massa Barat Membingkai Aksi Terorisme. *Jurnal Komunikasi*, 13(2). <https://doi.org/https://10.31294/jkom>
- Munzir, A. A., Asmawi, & Zetra, A. (2019). Beragam Peran Media Sosial dalam Dunia Politik di Indonesia. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 173–182. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2691>

- Neumann, A. L. (1998). *Freedom takes hold: ASEAN Journalism in Transition*. Committee to Protect Journalist.
- Oetama, J. (2001). *Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. PT Kompas Media Nusantara.
- Pratama, R. A. (2021). Kekuasaan, Pengetahuan, dan Hegemoni Bahasa dalam Perspektif Michele Foucault dan Francis Bacon. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 33–43.
- Ritonga, C. A. (2017). Peran Media Massa dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 2(1), 101–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.55745/jpp.v2i1.17>
- Riyanto, F. X. A. (2014). *Berfilsafat Politik*. Kanisius.
- Sarup, M. (2011). *Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme & Posmodernisme* (M. A. Hidayat (Trans.)). Jalasutra.
- Sitompul, P. (2014). Konstruksi Realitas Peran KPK dalam Pemberitaan Online Terkait Kasus Korupsi (Studi Framing Beberapa Pemberitaan Online Terkait Peran KPK pada Kasus Korupsi Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 18(2), 169–181.
- Suharyanto, A. (2016). Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(2), 123. <https://doi.org/10.31289/jap.v6i2.1051>
- Syahputra, I. (2010). Post Media Literacy ; Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault. *Jurnal ASPIKOM*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v1i1.4>
- Zubaidi, A., Jauhary, M. W., & Lestari, L. (2020). Peran Media Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik: Studi Pada Tirto.Id di Yogyakarta. *JURNAL KAWISTARA*, 10(1), 77–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/kawistara.41407>

